



## ANALISIS KRITIS PEMIKIRAN KHR. AS'AD SYAMSUL ARIFIN TENTANG NEGARA, SISTEM PEMERINTAHAN DAN PENERIMAAN AZAS TUNGGAL PANCASILA

Ahmad <sup>(1)</sup>, Hasbi Ash Shiddiqi <sup>(2)</sup>

<sup>1</sup> IAI Syaichona Mohammad Cholil Bangkalan, Hukum Pidana Islam, Indonesia

<sup>2</sup> Sekolah Tinggi Ilmu Syariah Nurul Qarnain, Hukum Keluarga Islam, Indonesia

[\\*ahjelly@gmail.com](mailto:ahjelly@gmail.com)

Address: JL. KH. Mohammad Cholil, No. 6, Demangan Barat, Demangan, Kec.  
Bangkalan. Jl. Imam Sukarto No 60 Kelurahan Balerbaru, Kecamatan Sukowono  
Kabupaten Jember

Author's correspondence: [ahjelly@gmail.com](mailto:ahjelly@gmail.com)

**Abstract.** This research will focus on the study of KHR Thought. As'ad Syamsul Arifin on the State System and the System of Government in Islam which is stated in the form of Acceptance of the Single Principle of Pancasila. This study wants to answer First; how does KHR think. As'ad Syamsul Arifin on the State System and the System of Government in Islam. Second; how KHR thinks. As'ad Syamsul Arifin about accepting Pancasila as a Single Principle. Methodology This research uses qualitative research with a conceptual and historical approach. Primary data sources are the book *al-ahkam as-Sulthoniyah* and the book *Biography of KHR. As'ad Syamsul Arifin, MUnas ALim Ulama' Situbondo Document in 1983*. The data collection technique in this study is documentation. Meanwhile, the data analysis technique carried out in this study is descriptive-interpretive. The results of this study show that KHR Thinking. As'ad Syamsul Arifin on the State System and the System of Government in Islam which is stated in the form of Acceptance of the Single Principle of Pancasila. KHR's thoughts. As'ad Syamsul Arifin on the State System and the System of Government in Islam was obtained comprehensively and completely from his contact with Hadlrotus Shaykh KH. Hasyim Asy'ari, as well as his real work in defending and contributing to the nation's journey. Standing as a Fighter for the Jihad Resolution, against the Japanese, taking part as a Constituent Member, Fighting against the PKI, and directly involved as a Politician. Meanwhile, KHR's thoughts. As'ad Syamsul Arifin about accepting Pancasila as a Single Principle is the culmination of his thoughts on the State System and the System of Government. According to Kiai As'ad, the first precept of Pancasila is a reflection of the teachings of monotheism in Islam. Not stopping here, Kiai As'ad boldly presented his views and direct criticism to President Soeharto who wanted to make Pancasila a tool to generalize the truth of all religions. This research contributes to strengthening the mapping of the role and contribution of Kiai Pesantren in the concept of the State and the Government system. The research has not reached the aspect of KHR thinking. As'ad Syamsul Arifin which is outlined in works/books/manuscripts.

**Keywords:** State, Government System, Single Principle of Pancasila.

**Abstract:** Penelitian ini akan focus dalam kajian tentang Pemikiran KHR. As'ad Syamsul Arifin tentang Sistem Negara dan Sistem Pemerintahan dalam Islam yang dituangkan dalam bentuk Penerimaan Azas Tunggal Pancasila. Kajian ini hendak menjawab Pertama; bagaimana Pemikiran KHR. As'ad Syamsul Arifin tentang Sistem Negara dan Sistem Pemerintahan dalam Islam. Kedua; bagaimana Pemikiran KHR. As'ad Syamsul Arifin tentang penerimaan Pancasila sebagai Azas Tunggal. Metodologi Penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif dengan pendekatan konseptual dan Historis. Sumber data primer kitab *al-ahkam as-Sulthoniyah* dan buku *Biografi KHR. As'ad Syamsul Arifin, Dokumen MUnas ALim Ulama' Situbondo tahun 1983*. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah dokumentasi. Sementara teknik analisa data yang dilakukan dalam penelitian ini adalah deskriptif-interpretatif. Hasil penelitian ini

Received: Juni 12, 2024; Revised: Juli 18, 2024; Accepted: August 27, 2024;

Online Available: Oktober 29, 2024; Published: Oktober 29, 2024;

\*Ahmad, [ahjelly@gmail.com](mailto:ahjelly@gmail.com)

*menunjukkan bahwa Pemikiran KHR. As'ad Syamsul Arifin tentang Sistem Negara dan Sistem Pemerintahan dalam Islam yang dituangkan dalam bentuk Penerimaan Azas Tunggal Pancasila. Pemikiran KHR. As'ad Syamsul Arifin tentang Sistem Negara dan Sistem Pemerintahan dalam Islam didapatkan secara komprehensif dan utuh dari persinggungan beliau dengan Hadlrotus Syaikh KH. Hasyim Asy'ari, serta kiprah nyata pembelaan dan kontribusi beliau dalam perjalanan bangsa. Berdiri sebagai Pejuang Resolusi Jihad, melawan Jepang, berkiprah sebagai Anggota Konstituante, Pejuang melawan PKI, dan terjun langsung sebagai Politisi. Sementara Pemikiran KHR. As'ad Syamsul Arifin tentang penerimaan Pancasila sebagai Azas Tunggal merupakan kulminasi pemikiran beliau tentang Sistem Negara dan Sistem Pemerintahan. Menurut Kiai As'ad, sila pertama Pancasila adalah cerminan dari ajaran tauhid dalam Islam. Tidak berhenti disini, Kiai As'ad dengan berani memaparkan pandangan dan kritikan langsung kepada Presiden Soeharto yang hendak menjadikan Pancasila sebagai alat menyamaratakan kebenaran semua agama. Penelitian ini berkontribusi dalam menguatkan pemetaan peran dan kontribusi Kiai Pesantren dalam konsep Negara dan sistem Pemerintahan. Penelitian belum menjangkau aspek pemikiran KHR. As'ad Syamsul Arifin yang dituangkan dalam karya/kitab/manuskrip.*

**Keywords:** Negara, Sistem Pemerintahan, Azas Tunggal Pancasila.

## INTRODUCTION

Istilah pemerintahan dan sistem negara berhubungan erat dengan istilah Dasar Negara. Secara kebahasaan (etimologi) dasar negara identik dengan istilah norma dasar (grundnorm), cita hukum/ide hukum (rechtidee), ide negara/cita negara (staatidee), dasar filsafat negara (philosophische grondslag). Aneka istilah yang menunjuk pada sistem negara, dasar negara menunjukkan bahwa konsep negara merupakan konsep universal. Setiap bangsa dan peradaban di dunia memiliki konsep dan pemikiran tersendiri tentang Negara. Sementara pengertian negara dari aspek terminology (istilah), adalah sebuah landasan atau dasar yang menjadi pijakan (awal) membentuk dan menyelenggarakan negara. Dasar negara dapat juga diartikan sebagai segala sesuatu yang menjadi sumber awal hukum bernegara. (Unggul et al., 2022)

Pada dasarnya, manusia telah tercipta secara berbeda-beda (heterogen). Pun demikian jika ditarika dalam sebuah entitas yang lebih besar. Heterogenitas atau kemajemukan adalah niscaya. Kemajemukan adalah realitas. Tuhan bahkan telah menegaskan dan menentukan sunnatullah berdiri diatas keberbedaan. Perbedaan adalah Sunnatullah. Perbedaan adalah anugerah. Tidak ada yang perlu dipertentangkan dalam adanya heterogenitas dan kemajemukan. Demikian, keniscayaan ini dipahami dan disadari betul oleh

Nabi Muhammad saat menyusun Negara Madinah. Perbedaan utama antara Makkah dan Madinah terletak pada heterogenitas dan kemajemukan ini. di Makkah penduduk relative lebih homogen, sementara di Madinah kemajemukan lebih terlihat. Menariknya, justru dalam masyarakat Madinah yang majemuk inilah, Nabi Muhammad berhasil menghidupkan sikap menghargai perbedaan, toleransi dan kemampuan menghormati perbedaan pada pihak lain. di Madinah ada ragam pemeluk Agama, suku, pendatang, pribumi dan lainnya. Diatas pondasi kemajemukan inilah, Nabi Muhammad membangun piagam Madinah, sekaligus menciptakan kehidupan yang harmonis. (Aris et al., 2021)

Perjalanan pendirian Indonesia tidak terlepas dari polemic serupa. Ada pertarungan dahsyat yang terjadi dalam diskursus bentuk Negara Indonesia. pertarungan diskursus ini terekam dalam sejarah BUPKI. Ada golongan yang mengusulkan agar bentuk Negara Indonesia nantinya menganut sekuler, Negara Islam, atau bahkan Sosialis dan lain sebagainya. Kalaupun pada akhirnya diskursus tersebut mengerucut dan memuncak dengan disepakatinya Pancasila sebagai rumusan titik temu. (Jailani, 2016) Landasan filosofis pancasila, bagaimanapun sedikit banyak terinspirasi dari Piagam Madinah yang telah dibangun oleh Nabi Muhammad. (Mursyid, 2016)

Tak bisa dipungkiri, sejarawan dunia mengakui bahwa Konstitusi Tertulis pertama di dunia, yang memuat tentang dasar-dasar demokrasi berasal dari Piagam Madinah. Bagaimana tidak, Piagam Madinah, yang diprakarsai oleh Nabi Muhammad berisi tentang perjanjian mengakui kehidupan setara antara semua pihak, dalam perbedaan suku, latar belakang, hingga agama. Piagam Madinah berisi pengakuan atas hak-hak suku Aus dan Khazraj secara merata, pengakuan atas hak muslim dan non Muslim (Yahudi dan Kristen) di dalam satu wadah Negara Madinah. Semua pihak yang mengakui keberadaan Negara Madinah berkewajiban memberikan keamanan sekaligus berhak mendapatkan mendapatkan jaminan keamanan. (Jailani, 2016)

Dalam konteks keberadaan Negara Indonesia, Pancasila yang terinspirasi dari akar heterogenitas Piagam Madinah hendak mempraktekkan nilai-nilai

yang sama. (Fahrudin, 2013) Sejarah keberadaan budaya dan peradaban berbeda berlaku juga dalam sejarah pendirian Negara Indonesia yang berlatar oleh multi etnis, suku dan juga agama. Piagam Madinah telah menjadi pemersatu kebudayaan dan peradaban sebuah bangsa. (Lukman, 2020) Hal sama, tentunya ingin ditiru dan dipraktekkan kembali melalui falsafah dasar negara Pancasila.

Sejarawan sekaligus Ulama' abad pertengahan Al-Mawardi mencatat bahwa pemerintahan Islam adalah pemerintahan yang dibangun dan didirikan sesuai dengan tuntutan zamannya. Islam tidak mengatur secara teknis bentuk dan sistem Pemerintahan Islam. Semuanya diserahkan kepada penguasa dan rakyat pada masa itu. Hal ini, mengisyaratkan ruang aplikasi yang lebar dalam sistem pemerintahan di Indonesia. (Rahmawati, 2018)

Dalam tataran implementasinya, diskursus bentuk Negara dan Sistem pemerintahan menjadi salah satu perdebatan dahsyat mulai dari awal pembentukan negara ini hingga sekarang. Tak pelak, hari ini, masih banyak, pihak-pihak yang menyangsikan legalitas Negara Indonesia menurut Syari'at Islam. Dalam kerangka ini, penelitian ini hendak mengkaji tentang Pemikiran KHR. As'ad Syamsul Arifin tentang Sistem Negara dan Sistem Pemerintahan dalam Islam yang dituangkan dalam bentuk Penerimaan Azas Tunggal Pancasila. Pemilihan tokoh, KHR. As'ad Syamsul Arifin dilatarbelakangi karena Kiai As'ad bersinggungan dengan Ulama' besar Syaikhona Moh. Cholil Bangkalan, Hadlrotus Syaikh KH. Hasyim Asy'ari, KH. Wahid Hasyim dan juga Ir. Sukarno dan beberapa tokoh lain.

Penelitian ini akan fokus dalam kajian tentang Pemikiran KHR. As'ad Syamsul Arifin tentang Sistem Negara dan Sistem Pemerintahan dalam Islam yang dituangkan dalam bentuk Penerimaan Azas Tunggal Pancasila. Kajian ini hendak menjawab *Pertama*; bagaimana Pemikiran KHR. As'ad Syamsul Arifin tentang Sistem Negara dan Sistem Pemerintahan dalam Islam. *Kedua*; bagaimana Pemikiran KHR. As'ad Syamsul Arifin tentang penerimaan Pancasila sebagai Azas Tunggal.

## RESEARCH METHODS

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif berupa *library research*. Yang dimaksudkan penelitian kualitatif *library research* dalam penelitian ini yaitu Pemikiran KHR. As'ad Syamsul Arifin tentang Sistem Negara dan Sistem Pemerintahan dalam Islam yang dituangkan dalam bentuk Penerimaan Azas Tunggal Pancasila. Pendekatan penelitian ini menggunakan pendekatan konseptual dan Historis. Pendekatan konseptual dalam penelitian ini yaitu penulis akan mengkaji tentang konsep Sistem Negara dan Sistem Pemerintahan dalam Islam. Sementara Pendekatan historis dalam penelitian ini yaitu penulis akan mengkaji tentang sejarah pemikiran KHR. As'ad Syamsul Arifin dalam merumuskan konsep penerimaan Azas Tunggal Pancasila dalam sistem bernegara di Indonesia.(Darmalaksana Wahyudin, 2020)

Sumber data primer kitab al-ahkam as-Sulthoniyah dan buku Biografi KHR. As'ad Syamsul Arifin, Dokumen MUnas ALim Ulama' Situbondo tahun 1983. Sementara data sekunder dalam penelitian ini yaitu al-Qurán, hadits, Tafsir, Syarh Tafsir, buku, jurnal yang berhubungan dengan tema Sistem Negara dan Sistem Pemerintahan dalam Islam dan Pemikiran KHR. As'ad Syamsul Arifin dalam Penerimaan Azas Tunggal Pancasila. Data primer dan sekunder tersebut akan disajikan secara simultan dan integratif untuk memetakan hakekat Sistem Negara dan Sistem Pemerintahan dalam Islam dan posisi pemikiran KHR. As'ad Syamsul Arifin dalam Penerimaan Azas Tunggal Pancasila

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan teknik dokumentasi. Sementara analisa datanya menggunakan deskriptif interpretative. Teknik deskriptif interpretative ini dilakukan dengan mendeskripsikan secara langsung hasil penafsiran yang dilakukan oleh peneliti. Peneliti akan melakukan *deskriptif- interpretatif* terhadap data temuan tentang Sistem Negara dan Sistem Pemerintahan dalam Islam dan posisi pemikiran KHR. As'ad Syamsul Arifin dalam Penerimaan Azas Tunggal Pancasila.

## RESULTS AND DISCUSSION

Pengertian Negara dalam konsep Negara Bangsa, bertalian erat dengan pengertian Bangsa. Bangsa (Sya'b) adalah sebuah kesatuan kelompok manusia yang mendiami wilayah tertentu dan memiliki persamaan sejarah cita-cita serta tujuan yang sama. Sebuah bangsa merasa terikat satu sama lain dengan komunitas yang sama. Sebuah bangsa disatukan oleh kesamaan ikatan sosiologis dan juga antropologis. Ikatan sosiologis timbul dari interaksi mereka sehari-hari sehingga menciptakan tatanan social yang sama. Sementara ikatan antropologis terbangun oleh tatanan social yang berlangsung secara turun temurun menghadirkan kesamaan pikiran komunal untuk mencapai tujuan bersama. Sebuah bangsa dapat juga terikat oleh ikatan politis, yaitu keinginan komunal untuk menciptakan sebuah tatanan aturan tunduk dan patuh terhadap entitas kedaulatan tertinggi baik keluar ataupun ke dalam. Entitas kedaulatan tertinggi inilah yang kemudian dikenal dengan istilah Negara. Dasar entitas kedaulatan tertinggi berupa Negara berarti sepakat atas aturan tertinggi yang mengatur seluruh sendi kehidupan baik kehidupan umum ataupun pribadi. (Astawa, 2017)

Entitas kedaulatan tertinggi tentu saja tersusun dari sebuah sistem kehidupan berbangsa yang komplek. Inilah yang kemudian di sebut dengan sistem kehidupan bernegara. Sistem berarti sebuah gabungan dari seluruh unsur yang bahu-membahu menjalankan masing-masing fungsi sehingga membentuk sebuah totalitas. Kata sistem sendiri berasal dari Bahasa Yunani, yaitu Syn dan Histani yang berarti menempatkan bersama (to place together). Sistem terdiri dari komponen-komponen yang salit terkait dan berhubungan satu sama lain, sehingga jika ada satu komponen yang tidak berjalan semestinya akan mengganggu dan mempengaruhi jalannya komponen-komponen lainnya.

Sementara pemerintahan merupakan entitas subjek yang menjalankan kedaulatan sebuah negara/bangsa. Pemerintahan dapat diartikan dengan pengertian sempit ataupun pengertian luas. Dalam pengertian yang luas, pemerintahan adalah segala tindakan yang dilakukan oleh Negara untuk

memberikan pelayanan kepada seluruh rakyatnya, sehingga kesejahteraan, kemakmuran, keamanan dapat tercipta untuk meningkatkan kualitas kehidupan rakyatnya sebagai tujuan bernegara. Pemerintahan dalam konteks sistem negara Modern yang menganut sistem pembagian kekuasaan negara mencakup keseluruhan eksekutif, legislative dan yudikatif. Sementara dalam pengertian sempit, pemerintahan adalah segala hal yang menjadi kewenangan pihak eksekutif.

Dalam pandangan Harun al-Rasyid, Sistem pemerintahan adalah sistem hukum yang mengatur segala aspek ketatanegaraan, dalam hubungannya menjalankan pemerintahan yang mengatur kewenangan masing-masing lembaga pemerintahan. Secara sederhana, sistem pemerintahan adalah sistem yang mengatur hubungan kerja dan kewenangan masing-masing lembaga negara.

Secara umum, sistem pemerintahan dibagi menjadi 3 yaitu:

1) Sistem Pemerintahan Parlementer (Parliamentary System)

Menurut Alan. R. Ball, sistem pemerintahan parlementer (the parliamentary types of government) memiliki ciri-ciri sebagai berikut:

- a) Kedaulatan rakyat diberikan oleh rakyat kepada lembaga perwakilan rakyat dalam sebuah sistem legislative;
- b) Kekuasaan negara bersifat nominal; artinya kekuasaan negara merupakan Kekuasaan milik Kepala Negara sebagai symbol atau lambang Negara.
- c) Kekuasaan menjalankan pemerintahan dipegang oleh seorang Perdana Menteri beserta cabinet yang dibentuk. Sementara Kepala Negara baik Presiden ataupun raja hanyalah symbol negara. kekuasaan Kepala Negara bersifat formal. Kekuasaan perdana Menteri dibangun atas keterwakilan mayoritas dalam lembaga parlemen sebagai lembaga legislative perwakilan rakyat.

2) Sistem pemerintahan presidensial (presidential system)

Dalam pandangan Jimly Asshiddiqie, sistem pemerintahan Presidensiil dapat dikenali dengan ciri-ciri sebagai berikut:

- a) Terdapat distingsi pemisahan yang jelas antara kekuasaan eksekutif dan legislative, serta yudikatif;
- b) Roda pemerintahan dijalankan sepenuhnya oleh Presiden sebagai pemegang mandate kekuasaan negara;
- c) Presiden menjadi pemilik kekuasaan tertinggi, baik sebagai kepala Pemerintahan Eksekutif ataupun Kepala Negara;
- d) Presiden dapat mengangkat para menteri sebagai pembantu presiden;
- e) Anggota legislative (parlemen) tidak dapat menjabat sebagai pemerintah eksekutif, dan juga sebaliknya;
- f) Dalam sistem presidensiil berlaku prinsip supremasi konstitusi sementara dalam sistem parlementer berlaku prinsip supremasi parlemen;
- g) Dalam sistem presidensiil, Presiden selaku pemegang kekuasaan eksekutif tidak dapat membubarkan parlemen; sementara dalam sistem Parlementer, Perdana Menteri dapat membubarkan parlemen;
- h) Presiden dan Parlemen (terutama dalam sistem pemilihan langsung) secara bersama-sama bertanggung jawab kepada Rakyat.

### 3) Sistem Pemerintahan Campuran (Mixed or Hybrid System)

Sistem pemerintahan campuran (mixed system atau hybrid system) merupakan variasi gabungan antara sistem pemerintahan parlementer dengan sistem pemerintahan presidensiil. Dalam sistem pemerintahan campuran ini muncul istilah quasi (setengah/semi) parlementer ataupun quasi (setengah/semi) presidensiil.

Dalam sistem pemerintahan campuran berlaku prinsip pemimpin tertinggi negara berada ditangan Presiden, namun Presiden bertanggung jawab kepada Parlemen sebagai representasi dari perwakilan rakyat. Dalam konsep ini, Parlemen (Legislatif selaku mandate wakil rakyat) dapat menjatuhkan presiden.

Dalam bentuk implementasinya, sistem pemerintahan campuran ini dapat lebih condong ke Presidensiil sehingga disebut semi Presidensiil, ataupun lebih condong ke Parlemerter sehingga disebut semi Parlemerter.

### 1. Negara Kesejahteraan (Welfare State)

Konsep negara kesejahteraan (welfare state) merupakan konsep negara yang menjadikan tujuan kesejahteraan, keadilan, ketentraman rakyatnya sebagai tujuan negara. Negara Kesejahteraan adalah merupakan konsep yang menjunjung tinggi bahwa kedaulatan rakyat merupakan kedaulatan tertinggi. Rakyat sebagai pemegang kekuasaan tertinggi. Oleh karenanya, rakyat harus dapat menerima manfaat keberadaan negara yaitu rakyat yang sejahtera, adil dan makmur. Konsep negara kesejahteraan merupakan antithesis terhadap konsep negara milik perseorangan (individu) ataupun juga milik pemilik modal (liberal capital).

rakyat merupakan tanggung jawab negara. Bernegara merupakan sarana untuk mewujudkan tujuan bersama berupa kesejahteraan.

Negara Indonesia sendiri dalam dokumen paling dasar yaitu Pancasila dan UUD 1945, memproklamkan dirinya sebagai Negara Kesejahteraan. Dalam sila ke 5 Pancasila, secara jelas disebutkan bahwa Keadilan Sosial bagi seluruh Rakyat Indonesia. demikian penjabaran berikutnya, dalam pembukaan UUD 1945, alinea kedua menyebut "adil dan makmur", alinea keempat menyebutkan "kesejahteraan umum" serta keadilan social bagi seluruh rakyat Indonesia. selanjutnya dalam Pasal 33 UUD NRI 1945 tertuang amanat "kemakmuran rakyat". konsepsi negara kesejahteraan Indonesia juga diakomodir dalam Pasal-Pasal 27 ayat (2), 31, 32, 33, dan 34 UUD NRI 1945. (ELVIANDRI, 2019)

### 2. Pancasila sebagai Dasar Negara

Pancasila sebagai dasar negara (grondslog) berarti bahwa Pancasila merupakan sumber pertama ditemukannya Negara Indonesia. sementara Pancasila sebagai Sumber Hukum Negara berarti bahwa segala sumber kemunculan hukum yang lahir dalam konteks bernegara di Indonesia harus

muncul dan keluar dari Pancasila. Hukum apapun dalam konteks bernegara tidak boleh bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila.

Nilai-nilai dasar yang tercantum dalam Pancasila yaitu, yaitu Ketuhanan, Kemanusiaan, Persatuan, Musyawarah dan Kerakyatan, serta keadilan sosial(Unggul et al., 2022).

a. Ketuhanan Yang Maha Esa

Nilai esensi pertama dari Pancasila adalah Nilai Ketuhanan Maha Esa. Bahwa Negara Indonesia menganut kepercayaan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Negara Indonesia menentang ketidapercayaan kepada TUhan (atheis) ataupun kepercayaan kepada selain Tuhan (agnostic). Nilai Ketuhanan berarti Negara Indonesia mengakui nilai-nilai spiritualitas yang bersifat transenden. Dalam tataran implementasinya, Rakyat Indonesia adalah rakyat yang agamis dan religious. Agama dan religi menjadi sendi fundamental dalam menjalankan roda berbangsa dan bernegara. Nilai Pancasila berkeKetuhanan tidak menafikan kemungkinan perbedaan terhadap nilai-nilai heterogenitas perbedaan agama yang dianut oleh rakyat Indonesia.

b. Kemanusiaan yang Adil dan Beradab

Tuhan menciptakan seluruh alam semesta ini sebagai bentuk anugerah kepada seluruh Manusia. Manusia ditugaskan oleh TUhan sebagai khalifah-Nya (pengganti) di muka bumi. Kemanusiaan menjadi pusat perhatian manusia, setelah keberTuhanan. Nilai kemanusiaan menjadi nilai perjuangan hidup manusia. termasuk dalam konteks bernegara. Nilai-nilai kemanusiaan harus menempatkan manusia lainnya sebagai pemenuhan kebutuhan hak-hak dasar manusia.

c. Persatuan Indonesia

Manusia tercipta dengan suku, latar belakang, etnis, wilayah yang berbeda. Persatuan meniscayakan kesadaran akan perbedaan. Kalaupun dalam kondisi yang berbeda-beda, manusia diharapkan dapat menemukan titik persamaan. Titik persamaan ini disimpulkan dalam bentuk persatuan.

Pengakuan diatas dasar perbedaan tersimbolkan dalam bentuk bhineka tunggal ika, berbeda-beda tetap satu jua.

d. Kerakyatan yang dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan

Kemanusiaan yang bertanggung jawab tercermin dalam bentuk Rakyat. Setiap rakyat adalah pemimpin. Dan seyogyanya setiap pemimpin maka harus mempertanggungjawabkan setiap perbuatannya. Manusia yang bertanggung jawab adalah manusia yang menjadi hikmah kebijaksanaan sebagai lentera pedoman hidupnya. Caranya dengan mengedepankan musyawarah dan menghargai kebijaksanaan yang ditawarkan oleh orang lain. kebijaksanaan berada diatas kebenaran, apalagi kepentingan pribadi (egoisme). Musyawarah mencerminkan sikap menghargai kebijaksanaan yang ditawarkan oleh orang lain, walaupun harus bertentangan dengan kebijaksanaan yang ditawarkan oleh pribadi. Tujuan besarnya adalah untuk mencari titik temu yang disebut kesepakatan (mufakat).

e. Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia

Tujuan bernegara adalah menciptakan kesejahteraan dan keadilan bagi seluruh rakyat. Inilah tujuan bersama konsep negara kesejahteraan. Keadilan dan kesejahteraan meniscayakan adanya keseimbangan, pemenuhan hak dasar manusia, pelayanan yang baik, hidup tanpa diskriminasi, serta persamaan hak asasi manusia, hak sipil, hak pendidikan, hak ekonomi, hak social dan hak budaya. Keadilan dan Kesejahteraan juga meniscayakan akan panggilan seluruh rakyat untuk memenuhi dan melaksanakan kewajibannya masing-masing secara bersamaan.

### 3. Pancasila sebagai Azas Tunggal

Pancasila sebagai hasil kristalisasi dari nilai-nilai kebudayaan bangsa Indonesia. Pancasila setidaknya menggambarkan bangsa Indonesia seutuhnya. Pancasila merupakan kulminasi titik temu pemikiran, falsafah hidup, jati diri, dan seluruh entitas Bangsa Indonesia. (Jaya, 2012) . Asas Tunggal Pancasila adalah penyeragaman dalam bidang ideologi yang dilakukan

pemerintah Orba. Anggapan dasar Orba bahwa perbedaan ideologi adalah sumber perpecahan Bangsa. Asas Tunggal Pancasila dimaksudkan agar stabilitas politik dan keamanan nasional sebagai faktor terpenting bagi pembangunan nasional dapat terwujud. Oleh karena itu semua kekuatan sosial-politik dipaksa mengubah dasarnya dengan Pancasila.

Dasar hukum Asas Tunggal Pancasila adalah sebagai berikut:

- a. TAP No.XX/MPRS/66 menempatkan Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum di Indonesia.
- b. TAP No.II/MPR/1978 penetapan Pedoman Penghayatan Pengamalan Pancasila (P4).
- c. UU No.3/1985 ditetapkannya Pancasila sebagai asas Partai Politik.
- d. UU No.8/1985 ditetapkannya Pancasila sebagai asas Organisasi Kemasyarakatan (Ormas).

Dari landasan dasar hukum itulah, kemudian Pemerintah Orde baru menyelenggarakan sosialisasi pelaksanaan pancasila sebagai azas tunggal negara Indonesia secara menyeluruh. Artinya, bahwa Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum di Indonesia, yang berlaku kepada seluruh entitas bernegara, baik penyelenggaran negara, partai politik ataupun organisasi kemasyarakatan. Dengan demikian pemberlakukan azas tunggal pancasila inilah, tidak ada entitas organisasi apapun yang tidak menjadikan Pancasila sebagai dasar hukumnya.(Sudarta, 2022)

#### 4. Biografi Kiai As'ad Syamsul Arifin

K.H.R. As'ad Syamsul Arifin lahir di Makkah (Syiib Ali ) pada tahun 1897 M. Beliau lahir dari pasangan keluarga Raden Ibrahim istrinya bernama Nyai Siti Maimunah. Raden Ibrahim sendiri kemudian lebih dikenal dengan panggilan K.H.R. Syamsul Arifin. Pemberian nama As'ad tidak terlepas dari sejarah kelahirannya. Saat mengandung sang Putra, Raden Ibrahim bermimpi anak yang dikandungnya lahir dalam kondisi berbulu layaknya macan, dan dikedua

bahunya tertulis asad (yang berarti singa/macan). Dari kisah tersebutlah, tatkala lahir, Raden Ibrahim memberi nama dengan suku kata yang berdekatan dengan akar kata *asad*. Lafadz As'ad merupakan *isim tafdhil* yang berarti (lebih/sangat bahagia). (Abdurrahman, 2019)

Setelah beberapa lama tinggal di Makkah, Raden Ibrahim lalu kembali ke Madura, tepatnya Kembang Kuning Pamekasan. Di Desa Kembang Kuning Pamekasan inilah, As'ad muda menghabiskan masa kecilnya. Jalur Nasab Kiai As'ad bersambung hingga Sunan Ampel. Berdasarkan catatan yang dihimpun KH. Dhofir Munawwar, berikut adalah jalur silsilah KHR. As'ad Syamsul Arifin. KHR. As'ad Syamsul Arifin bin KHR. Syamsul Arifin bin Raden Ruham bin Bhujuk Bagandan Sidobulangan bin Bhujuk Cendana bin Raden Makhdum Sunan Bonang bin Raden Rahmat Sunan Ampel.

Pendidikan K.H.R. As'ad Syamsul Arifin di mulai menimba ilmu di Madrasah Sholatiyah Makkah. Di Makkah Kiai As'ad belajar dan berguru kepada Syaikh Hasan al-Massad, Sayyid Muhammad Amin al-Kutby, Sayyid Hasan al-Yamani, Sayyid Abbas al-Maliki, Sayyid Alawi bin Abbas Al-Maliki. Setelah periode Makkah, Kiai As'ad muda kembali ke tanah air. Saat berada di tanah air, Kiai As'ad muda melanjutkan jenjang pendidikannya. Beberapa pondok yang pernah menemani sejarah pendidikan Kiai As'ad antara lain; Pondok Pesantren Banyuanyar Madura dibawah asuhan Kiai Haji Abdul Majid dan Kiai Haji Abdul Hamid, Pondok Pesantren Sidogiri Pasuruan dibawah asuhan KH. Nawawi, Pondok Pesantren Buduran Panji Sidoarjo dibawah asuhan KH. Khozin, berlanjut di Pondok Pesantren Demangan Bangkalan dibawah asuhan KH. Moh. Kholil bin Abdul Latif dan terakhir di Pondok Pesantren Tebuireng Jombang dibawah asuhan KH. Hasyim Asy'ari. Saat Mondok di Pondok Pesantren Demangan Bangkalan itulah, Kiai As'ad menjalankan peran sejarah monumental sebagai wasilah Syaikhona Muhammad Kholil Bangkalan dan Hadlrotus Syaikh KH. Hasyim Asy'ari. Sementara di Pondok Tebuireng, di bawah asuhan Hadlrotus Syaikh KH. Hasyim Asy'ari, Kiai As'ad memperoleh kesan mendalam sebagai seorang

santri. Dalam kesaksian Kiai As'ad sendiri, Tebuireng merupakan pondok yang paling berpengaruh bagi pembentukan kepribadiannya.

KHR. As'ad Syamsul Arifin adalah salah satu tokoh besar yang dilahirkan dari rahim Pesantren dan Nahdlatul Ulama'. Kiprah dan kontribusi beliau untuk Bangsa telah diakui dengan bukti penganugerahan sebagai Pahlawan Nasional. Anugerah gelar pahlawan ini dikukuhkan pada Peringatan Hari Pahlawan 10 Nopember tahun 2016.

##### 5. Munas Alim Ulama' 1983 dan Mukhtar NU 1985 di Situbondo

Dekade Tahun 1980-an dapat dikategorikan periode gonjang ganjing dalam perjalanan Nahdlatul Ulama' dan juga Bangsa Indonesia. Kepengurusan NU lebih kental dalam nuansa politik praktis. Kegiatan-kegiatan keagamaan, dakwah dan social termarginalkan. KH. Idham Kholid selaku Ketua PBNU, lebih banyak terlibat dalam politik praktis, sementara beliau berada dalam kondisi kesehatan yang sering sakit-sakitan. Kondisi ini memantik kekhawatiran berlebih dalam tokoh-tokoh sepuh NU. Beliau-beliau antara Kiai As'ad, Kiai Achmad Siddiq, Kiai Masjkur, Kiai Machrus Ali dan Kiai Ali Maksum. KH. Idham Kholid kemudian mengundurkan diri dari Ketua Umum PBNU atas saran dari Tokoh-tokoh senior, namun kemudian dicabut kembali. Kondisi ini memantik dualisme kepemimpinan di tubuh NU. NU versi KH. Idham Kholid kubu Cipete, dan NU Versi Kiai As'ad Kubu Situbondo.

Disisi lain, kekuatan Pemerintah Orde baru dibawah Presiden Soeharto berada dalam titik kuatnya. Presiden Soeharto memprioritaskan stabilitas politik dan keamanan. Praktisnya, Presiden Soeharto tidak segan-segan *memberangus* lawan politik yang dianggap mengganggu rencana pembangunan nasional. Kritik, kebebasan berpendapat, menjadi sangat mahal. Tak terkecuali, NU berada dalam kondisi pengawasan ketat dari Pemerintah. Penerapan azas tunggal pancasila menjadi salah satu jurus yang dipakai oleh Orde Baru untuk melaksanakan hegemoni politiknya.

Di tengah kondisi NU dan perpolitikan nasional ini, Kiai As'ad Syamsul muncul sebagai tokoh Nasional yang berani pasang badan untuk NU. Pada saat yang

bersamaan, Kiai As'ad memainkan politik ciamik dengan mendekat kepada Presiden Soeharto. Dalam kondisi inilah, Munas Alim Ulama' 1983 dan Mukhtar NU 1984 berlangsung di Situbondo. Hal inipun menyiratkan, betapa sentralnya posisi Kiai As'ad baik ditubuh Struktural NU ataupun dihadapan Presiden Soeharto. (Sudarta, 2022)

Sejarah Munas ALim Ulama' tahun 1983 dan Mukhtar NU tahun 1984 melahirkan keputusan monumental dalam sejarah perjalanan NU sekaligus Bangsa Indonesia. Keputusan monumental tersebut yaitu *pertama*; Nahdlatul Ulama' kembali ke khittah tahun 1926 dan memisahkan garis dengan Politik Praktis. *Kedua*; NU menerima Pancasila sebagai Azas Tunggal berbangsa dan bernegara.

Adapun keputusan Khittah NU 1926 adalah sebagai berikut:

1. Mengembalikan aktivitas NU dari bidang politik ke bidang asalnya, yakni bidang dakwah, pendidikan dan sosial. Terlalu lama NU berkecimpung di dunia politik praktis (sejak 1955- 1982), hingga garapan pokoknya terbengkelai.
2. Menyerahkan sepenuhnya kepada warga NU dalam menyalurkan aspirasi politiknya, apakah ke Golkar, PPP maupun PDI yang memang dipandang baik dan tidak bertentangan dengan Islam.
3. Membenahi organisasi, setelah terperangkap dalam kemelut intern sesuai Munas Ulama Kali Urang, Yogyakarta, 1981, yang melahirkan dua kubu: Cipete dan Situbondo.

Sementara keputusan penerimaan azas tunggal Pancasila dirumuskan dalam Deklarasi tentang hubungan pancasila sebagai berikut:

1. Pancasila sebagai dasar dan falsafah Negara Republik Indoneeia bukanlah agama, tidak dapat menggantikan agama dan tidak dapat dipergunakan untuk menggantikan kedudukan agama.
2. Sila Ketuhanan Yang Maha Esa sebagai dasar Negara Republik Indoneaia menurut pasal 29 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945, yang menjiwai sila-

sila yang lain, mencerminkan tauhid menurut pengertian keimanan dalam Islam.

3. Bagi Nahdlatul Ulama, Islam adalah aqidah dan basyariah meliputi aspek hubungan manusia dengan Allah dan hubungan antar manusia.
4. Penerimaan dan pengamalan Pancasila merupakan perwujudan dari upaya umat Islam Indonesia untuk menjalankan syari'at agamanya.
5. Sebagai konsekuensi dari sikap di atas, Nahdlatul Ulama berkewajiban mengamankan pengertian yang benar tentang Pancasila dan pengamalannya yang murni dan konsekuen oleh semua pihak.

Keputusan tersebut disetujui dan disepakati oleh Peserta Munas Alim Ulama' pada tanggal 21 Desember 1983 / 16 Rabiul Awwal 1404 H di Pesantren Salafiyah Syafi'iyah Sukorejo Asembagus Situbondo Asuhan KHR. As'ad Syamsul Arifin.

#### 1. Negara dan Pemerintahan dalam Islam

Salah satu kajian tentang Negara dan Sistem Pemerintahan dari Ulama' Muslim lahir dari tangan Abu Hasan Ali al-Mawardi dengan sebuah kitab *al-Ahkam ash-Sultoniyyah*. Al-Mawardi merupakan Ulama' abad Pertengahan, pada masa Pemerintahan Daulah Abbasiyah, lahir pada tahun 972 dan wafat pada 1058 di Basrah Irak. Al-Mawardi mengawali kajiannya dengan merekam sejarah pemerintahan awal sejarah politik Islam sejak Nabi membangun Negara Madinah hingga mengalami perkembangan sampai pada masa dinasti Abbasiyyah. Dalam kitab ini, al-Mawardi banyak menguraikan tentang prinsip-prinsip pemerintahan dalam Islam. Nasbul Imam, Kriteria Imam dan azas-azas yang lain. (Al-Mawardi, 2000)

Sebagaimana maklum, bahwa pada prinsipnya, Nabi Muhammad tidaklah mewariskan harta, warisan, ataupun juga kerajaan. Nabi Muhammad mewariskan pusaka yaitu Kitab Allah dan Sunnah Rasulullah. Setelah Rasulullah wafat, hal pertama yang menjadi perdebatan di kalangan Sahabat adalah siapakah pemimpin yang akan menggantikan posisi Nabi Muhammad.

Adanya perdebatan menghasilkan kesimpulan dengan jelas, bahwa Nabi Muhammad tidaklah menetapkan dan menentukan negara dan sistem pemerintahan seperti apa yang harus dilakukan sepeninggal Nabi. Andailah ada ketetapan dari Nabi tentang konsep Negara dan sistem Pemerintahan, pastilah sahabat tidak akan berdebat.

Proses penyusunan pertama sepeninggal Rasulullah dilakukan dengan cara Musyawarah yang dilakukan di Kediaman Tsaqifah Bani Sa'idah. Dari musyawarah ini, terpilih Sayyidina Abu Bakar sebagai Khalifah pertama. Semua sahabat sepakat dan berbaiat setia kepada Khalifah Abu Bakar. Sepeninggal Sy Abu Bakar Wafat, estafet kepemimpinan dilanjutkan dengan cara penunjukan langsung oleh Sy Abu Bakar kepada Sy Umar ibn Khattab. Pun demikian, semua Sahabat sepakat dan berbai'at setia kepada Sy Umar Ibn Khattab. Selanjutnya, dalam proses selanjutnya, sebelum Sy Umar ibn Khattab wafat, beliau melihat transisi kepemimpinan sebagai urusan yang serius. Oleh karena itulah, Sy. Umar bin Khattab kemudian membentuk Tim Pemilihan yang disebut dengan *ahl al-halli wal 'aqdi*. Tim Pemilihan *ahl al-halli wal 'aqdi* ini kemudian bermusyawarah mufakat mengangkat Sy. Utsman bin Affan sebagai pengganti Khalifah Umar bin Khattab. Proses berbeda terjadi, saat Khalifah Sy Utsman bin Affan wafat. Terjadi kemelut dan krisis politik yang dahsyat, tentang siapakah yang layak menggantikan posisi Khalifah Sy Utsman bin Affan. Akhirnya pemilihan dilakukan secara terbuka dan aklamasi oleh seluruh sahabat. Pemilihan terbuka dan aklamatif tersebut kemudian menghasilkan Sy Ali bin thalib terpilih sebagai Khalifah. Dari keempat proses pemilihan ini, dapat diintrodusir secara jelas, bahwa Sistem Pemerintahan yang diawali dari sistem pemilihan tidaklah kaku. Artinya, tidak ada sistem pemerintahan yang baku dalam Islam. Proses sejarah selanjutnya semakin mengokohkan ketiadaan sistem pemerintahan dalam Islam. Setelah periode Khulafaurrasyidin, maka lahirkan sistem pemerintahan dinasti-monarki, dalam sejarah Dinasti Umayyah dan Dinasti Abbasiyah. Sistem Pemerintahan Dinasti Umayyah dan Abbasiyah diwariskan secara turun temurun dari satu generasi ke generasi berikutnya. (Riri Reza anshori, 2021)

## 2. Sistem Negara dan Pemerintahan Indonesia

Sebelum perubahan UUD 1945, Indonesia menganut sistem pemerintahan yang dianut adalah presidensil akan tetapi dalam praktiknya presiden sebagai kepala pemerintahan bertanggung jawab kepada MPR sebagai lembaga tertinggi yang memilih dan melantik presiden. Di dalam Pasal 4 dan Pasal 17 UUD 1945 menunjukkan bahwa pemerintahan Indonesia menganut sistem presidensil, dimana presiden menjadi kepala eksekutif (pemerintahan) dan mengangkat serta memberhentikan para menteri yang bertanggung jawab kepadanya. Tapi jika dilihat dari Pasal 5 ayat (1) dalam hubungannya dengan Pasal 21 ayat (2) UUD 1945, dapat dipastikan bahwa sistem presidensil tersebut bukan sistem yang sepenuhnya, karena menurut pasal tersebut, presiden dan DPR bersama-sama membuat undang-undang yang berarti sistem pemerintahan di Indonesia itu bukan merupakan pelaksanaan dari ajaran trias politica. Pertanggung jawaban presiden ke MPR mengandung ciri-ciri parlementer dan juga kedudukan presiden sebagai mendataris pelaksanaan GBHN menunjukkan supremasi dari MPR. (Sudarta, 2022)

Berdasarkan Pasal 4 ayat (1) dan Pasal 17 UUD 1945, sistem pemerintahan di Indonesia adalah presidensial karena presiden adalah eksekutif dan menteri-menteri adalah pembantu presiden. Tetapi apabila dilihat dari sudut pertanggung jawaban presiden kepada MPR, maka berarti eksekutif dapat dijatuhkan oleh lembaga lain. Dengan keadaan demikian, maka pada dasarnya sistem pemerintahan dibawah UUD 1945 sebelum amandemen bukanlah sistim presidensil murni atau dapat disebut quasi presidensil. Sementara setelah amandemen UUD 1945, Indonesia tetap mempertahankan sistem presidensil dengan beberapa penyesuaian dan penyempurnaan. Penyesuaian dan penyempurnaan dilakukan sesuai dengan dinamika perpolitikan dan perkembangan di Indonesia serta memenuhi ciri-ciri umum sistem presidensil.

## 1. Pemikiran Kiai As'ad Syamsul Arifin tentang Negara dan Sistem Pemerintahan dalam Islam

Diskursus Pemikiran Kiai As'ad Syamsul Arifin tentang Negara dan Sistem Pemerintahan dapat dilacak dalam fakta historis interaksi beliau dengan sang Guru yaitu Hadlrotus Syaikh KH. Hasyim Asy'ari. Sebagaimana pengakuan dari Kiai As'ad sendiri, bahwa saat mondok dibawah asuhan KH. Hasyim Asy'arilah beliau mendapatkan momentum paling istimewa dalam sejarah hidupnya. Boleh dikata, bahwa KH. Hasyim Asy'arilah yang paling berpengaruh dalam pembentukan jiwanya. Menelisik korelasi ini menghasilkan diskursus bahwa pemikiran Kiai As'ad tentang sistem Negara dan sistem Pemerintahan banyak dipengaruhi oleh Sang Guru.

Oleh karena itu, sebelum menganalisis pemikiran Kiai As'ad tentang sistem Negara dan sistem Pemerintahan, maka penting untuk mengkaji bagaimana pemikiran sang Guru KH. Hasyim Asy'arilah tentang Negara dan Sistem Pemerintahan Islam. Penggalan sejarah ini dapat dilacak dari persinggungan KH. Hasyim Asy'arilah dengan Pancasila, melalui mediasi sang Putra yaitu KH. Wahid Hasyim. (*Tirakat KH Hasyim Asy'ari Saat Mentashih Rumusan Pancasila*, n.d.)

Salah satu diskursus menarik terkait Pancasila, kembali pada Piagam Jakarta sebagai cikal bakal naskah Pancasila(Nurhadi, 2019). Sila Pertama Pancasila dalam Piagam Jakarta berbunyi "*Ketuhanan dengan kewajiban menjalankan Syari'at Islam bagi Pemeluk-pemeluknya*". Redaksi kalimat ini menuai kontroversi dan protes keras dari kalangan Non-Muslim yang berasal dari kawasan Timur. Mereka (non-Muslim) berpandangan bahwa redaksi tersebut bernuasa diskriminatif bagi keberadaan Non-Muslim. Protes keras menyebabkan deadlock yang berlarut-larut.

Terhadap masalah krusial ini, Ir. Soekarno sebagai tokoh sentral menyerahkan berdiskusi dan menyerahkan urusan kepada KH. Wahid Hasyim selaku anggota BPUPKI agar meminta fatwa dan nasehat kepada Hadlrotus Syaikh KH. Hasyim Asy'ari. Selain memang, bahwa Ir. Soekarno memiliki

kedekatan tersendiri dengan KH. Hasyim Asy'ari. Diutuslah rombongan yang diketuai oleh KH. Wahid Hasyim untuk menghadap KH. Hasyim Asy'ari.

Setelah mengutarakan maksud kedatangan, KH. Hasyim Asy'ari tidak langsung menjawab. Beliau meminta waktu untuk melakukan riyadloh dan istikharah. Riyadlah yang dilakukan oleh KH. Hasyim Asy'ari yaitu melakukan puasa 3 hari. Selama puasa tersebut, beliau meng-khatam-kan Al-Qur'an dan membaca Al-Fatihah. Setiap membaca Al-Fatihah dan sampai pada ayat *iya kana' budu waiya kanasta'in*, Kiai Hasyim mengulanginya hingga 350.000 kali. Kemudian, setelah puasa tiga hari, Kiai Hasyim Asy'ari melakukan shalat istikharah dua rakaat. Rakaat pertama beliau membaca Surat At-Taubah sebanyak 41 kali, sedangkan rakaat kedua membaca Surat Al-Kahf juga sebanyak 41 kali. Kemudian beliau istirahat tidur. Sebelum tidur Kiai Hasyim Asy'ari membaca ayat terkahir dari Surat Al-Kahf sebanyak 11 kali.

Setelah 3 hari, pada pagi harinya, Kiai Hasyim Asy'ari memanggil putranya, Wahid Hasyim dan memberikan jawaban bahwa Pancasila sudah betul secara syari'at. Usulan penghapusan kalimat sila pertama dalam piagam Jakarta dan penggantian dengan kalimat *Ketuhan Yang Maha Esa* telah mencerminkan tauhid dalam Islam. (Riri Reza anshori, 2021) Penerimaan KH. Hasyim Asy'ari secara ideologis kemudian dilanjutkan oleh Putranya yaitu KH. Wahid Hasyim. (Aulia, 2019)

Pemikiran Kiai As'ad Syamsul Arifin tentang Negara dan Sistem Pemerintahan dalam Islam kiranya semakin diperjelas dalam rekam jejak sejarah berikut:

*Pertama*; Resolusi Jihad; K.H.R. As'ad Syamsul Arifin mampu menggerakkan Rakyat khususnya di daerah keresidenan Besuki (Situbondo, Bondowoso, Jember, Banyuwangi) untuk melawan sekutu tentunya berkaitan dengan Resolusi Jihad 22 Oktober 1945 yang dihukumi Fardu ain Oleh KH. Hasyim As'ari Maklumat yang menggentarkan seantero Indonesia khususnya pemuda Surabaya yang sampai lalu berhadapan tentara dengan Britania Raya dan India Britania berakibat peperangan yang alot hingga sehari-hari dan menimbulkan korban berguguran hingga puncak pada 10

Nopember 1945 diperingati sebagai Hari Pahlawan. *Kedua;* Perang Agresi Militer Belanda 1947-1948 K.H.R. As'ad Syamsul Arifin Memimpin Perang Gerilya Karesidenan Besuki (1945-1949), antara lain K.H.R. As'ad memimpin pasukannya untuk mencuri senjata di Gudang Mesiu Dabasah Bondowoso (Ramadhan 1366 H, Akhir Juli 1947). K.H.R. As'ad Syamsul Arifin bersama beberapa anggota Pelopor mencuri senjata di Dabasah. Kemudian terlibat perang di beberapa daerah di Bondowoso. Belanda menyerang pertama kali ke Pondok Sukorejo (Oktober 1947). Agresi I Belanda ke Pesantren Sukorejo. Namun ketika masuk pesantren, Belanda sudah tidak menjumpai para pejuang karena mereka sudah meninggalkan pondok pesantren. Pemimpin pasukan Belanda menjadikan Sukorejo sebagai "Daerah suci" (heilige zone) yang merupakan kawasan terlarang bagi pasukan Belanda maksudnya pasukan Belanda dilarang keras untuk memasuki daerah tersebut, walaupun untuk menangkap para tokoh pejuang kemerdekaan Republik Indonesia. K.H.R. As'ad Syamsul Arifin menjadikan Sukorejo sebagai pusat perjuangan. Banyak ulama dan para pejuang dari daerah Karesiden Besuki, Probolinggo, dan Madura yang mengungsi ke Sukorejo.

Menurut K.H.R. As'ad Syamsul Arifin sekitar sepuluh ribu pejuang yang berada di Sukorejo. Tiap hari, K.H.R. As'ad Syamsul Arifin menyembelih 2 ekor sapi untuk lauk pauk para pejuang dan menghabiskan 480 ekor sapi Belanda Menyerang Kedua Kali Ke Sukorejo (Nopember 1948). Pasukan Belanda di bantu pasukan Cakra menyerang Pesantren Sukorejo untuk kedua kalinya. Pasukan Cakra mengeledah asrama-asrama santri dan merampok beberapa barang milik santri. Belanda menyerang lagi Sukorejo; karena pada tgl 16 Nopember 1948, Van Der Plas menggelar Konperensi Dewan Kabupaten yang diikuti "Perwakilan rakyat" se-Jawa Timur di Bondowoso yang akan membentuk Negara Jawa Timur. Sebelumnya, untuk menghindari penyusupan gerilyawan, Belanda menggelar pembersihan total di beberapa daerah di Karesidenan Besuki

*Ketiga;* Penumpasan PKI Gerakan perjuangan K.H.R. As'ad Syamsul Arifin, nyatanya tak kenal henti. Sejarah mencatat, pada masa pemberontakan

Gerakan 30 September (G 30 S) PKI, 1965, beliau bersama para santri Pondok Pesantren Salafiyah Syafi'iyah Sukorejo, Asembagus, Situbondo, Jawa Timur kembali mengambil peran cukup vital dalam pemberantasan Partai Komunis Indonesia (PKI). Menurut catatan Hasan Basri, hampir semua gerakan penumpasan baik oleh ABRI (kini TNI) maupun gerakan anti PKI di wilayah Eks Karesidenan Besuki, terlebih dahulu mendapat konfirmasi K.H.R As'ad Syamsul Arifin.<sup>10</sup> Setidaknya, langkah tersebut sebagai langkah suci dan nyata dari perjuangan K.H.R As'ad Syamsul Arifin, di samping menjadikan Pondok Pesantren Salafiyah Syafi'iyah Sukorejo, Asembagus, Situbondo, Jawa Timur sebagai penjaga nilai-nilai keagamaan dan semangat independen dalam perlawanan bersenjata dan pergerakan rakyat

*Keempat;* Terjun sebagai Politisi. K.H.R. As'ad Syamsul Arifin mencoba terjun ke politik praktis, sebagai anggota konstituante partai NU (1957-1959), selain itu Beliau lebih intes di Politik kebangsaan dan tokoh di balik layar: Penasihat Pribadi Wakil Perdana Menteri KH. Idham Khalid (1956-1957) dalam kabinet Ali Sastroamidjojo. Penasihat Subhan ZE (politisi muda NU) dan Penasihat beberapa pengurus dan politisi NU selain itu kiprah Beliau yaitu ikut membentuk MUI pada tahun 1975.

## **2. KHR As'ad Syamsul sebagai aktor Intelektual Penerimaan Azas Tunggal Pancasila**

Dalam perjalanan Munas NU tahun 1983 dan MUKTAMAR tahun 1984, Siapapun tentu masih ingat bahwa Kiai As'ad lah yang pertama kali mengemukakan, sila pertama Pancasila adalah cerminan dari ajaran tauhid dalam Islam. Bahkan pikiran itu dikemukakan langsung kepada Presiden Soeharto, ketika beliau menghadap dalam keperluan perubahan buku PMP saat beliau menghadap kepada Presiden tahun 1982.

Dalam kesaksian yang disampaikan oleh KH. Afifudin Muhajir bahwa Yang paling berperan dalam MUNAS tentu yang berperan itu banyak, pemikirnya banyak sekali Kiai Ahmad Sidiq, Gus Dur ketika itu masih banyak Kiai-Kiai yang luar biasa Kiai Mahrus Ali, Kiai Ali Ma'sum krapyak mereka semua berperan tentang konsep-konsep pengikut pancasila tentang ketata

negara sudah banyak pakarnya tapi jika tidak ada Kiai As'ad mungkin tidak akan berakhir keputusan Mukhtamar itu.

Kiai As'ad adalah Ulama' yang kharismatik, baik di mata Ulama' lain dan bahkan di hadapan Presiden Soeharto. Kiai As'ad menemui Presiden Soeharto karena Kiai As'ad mendengar seolah-olah pak Harto ini ingin menjadikan Pancasila sebagai agama. Kiai As'ad datang kesana, "apa kemauan pak Harto ini apakah ingin menjadikan pancasila menggantikan agama-agama sehingga islam tidak ada, Kristen tidak ada, atau bagaimana maunya", Pak Harto mengatakan "oh tidak kiai agama adalah pegangan kita dalam menjalani kehidupan sedangkan pancasila adalah pegangan kita dalam menjalani kehidupan berbangsa dan bernegara".

Setelah itu maka pengagasan Munas berlanjut dan terlaksana jadi pemainnya adalah Kiai As'ad mungkin orang-orang sekarang tidak tau betapa ganasnya pak Harto di orde baru kalau tidak berani seberani Kiai As'ad mungkin tidak akan datang ke istana. Memang yang kurang sekarang adalah kekurangan ulama' kalau yang alim cerdik cerdas itu banyak, tapi keberanian sedikit.

Pada tahun 1982 K.H.R. As'ad Syamsul Arifin menghadap Presiden Soeharto untuk menyampaikan keresahan umat soal buku Pendidikan Moral Pancasila (PMP). Dalam buku PMP yang diajarkan di sekolah disebutkan: Bahwa semua agama pada hakikatnya sama baiknya atau sama benarnya. Kalimat inilah yang membuat kalangan umat Islam resah, begitu pula warga Nahdliyyin. Tanpa banyak bicara, K.H.R. As'ad Syamsul Arifin mendatangi Presiden Soeharto. K.H.R. As'ad Syamsul Arifin mengharap, supaya Presiden Soeharto kelak menjadi husnul khotimah, Beliau pun memaparkan bahwa umat Islam sekarang sedang resah karena merusak akidah. Beberapa waktu kemudian, buku tersebut mengalami revisi dengan redaksi: Bahwa semua agama pada hakikatnya sama baiknya menurut keyakinan pemeluk agama masing-masing. Kiprah dari K.H.R. As'ad Syamsul Arifin yang paling monemental adalah Peneguhan Asas Tunggal Pancasila melalui Munas dan Mukhtamar NU (1983-1984). Kiai As'ad menjadi aktor utama dibalik penerimaan

asas tunggal Pancasila. Di samping itu K.H.R. As'ad Syamsul Arifin juga sebagai tuan rumah Munas dan Mukhtamar. (Sudarta, 2022)

"Mukhtamar 1984 itu, Ke 27 tahun 1984, Mukhtamar Situbondo itu sesungguhnya kelanjutan dari Munas alim ulama NU tahun 1983, Yang kita tlesik sesungguhnya bukan Mukhtamarnya tapi Munasnya. Munas itu kan Berbicara tentang Pancasila sebagai asas tunggal dan hubunganya Pancasila dengan agama dan lainnya Kemudian hasil Munas yang sangat luar biasa itu dikokohkan dalam tahun Mukhtamar 1984 Yang menarik adalah pernyataan Kiai Ahmad Sidiq pada penutupan Munas itu. Kiai Ahmad Sidiq bilang "Seandainya Kiai As'ad tidak punya amal sholeh lain kecuali sukses Munas ini, ini sudah cukup bagi Kiai As'ad sebagai bekal hidup diakhirat katanya Kiai Ahmad Sidiq" Kira-kira kenapa Kiai Ahmad Sidiq menyatakan seperti itu, saya memahami bahwa sukses Munas tahun 1983 di situbondo bukan hanya menyelamatkan NU yang pada saat itu sedang bermasalah, sebab menyelamatkan NKRI dengan keputusan yang sangat strategis tentang hubungan Islam dan Pancasila serta penerimaan Pancasila sebagai asas tunggal dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.



(Dokumen Pancasila dan deklarasi hubungan pancasila dengan islam)

## CONCLUSIONS AND SUGGESTIONS

KHR. As'ad Syamsul Arifin adalah salah satu tokoh besar yang dilahirkan dari rahim Pesantren dan Nahdlatul Ulama'. Kiprah dan kontribusi beliau untuk Bangsa telah diakui dengan bukti penganugerahan sebagai Pahlawan Nasional. Pemikiran KHR. As'ad Syamsul Arifin tentang Sistem Negara dan Sistem Pemerintahan dalam Islam yang dituangkan dalam bentuk Penerimaan Azas Tunggal Pancasila. Pemikiran KHR. As'ad Syamsul Arifin tentang Sistem Negara dan Sistem Pemerintahan dalam Islam didapatkan secara komprehensif dan utuh dari persinggungan beliau dengan Hadlrotus Syaikh KH. Hasyim Asy'ari, serta kiprah nyata pembelaan dan kontribusi beliau dalam

perjalanan bangsa. Berdiri sebagai Pejuang Resolusi Jihad, melawan Jepang, berkiprah sebagai Anggota Konstituante, Pejuang melawan PKI, dan terjun langsung sebagai Politisi. Sementara Pemikiran KHR. As'ad Syamsul Arifin tentang penerimaan Pancasila sebagai Azas Tunggal merupakan kulminasi pemikiran beliau tentang Sistem Negara dan Sistem Pemerintahan. Menurut Kiai As'ad, sila pertama Pancasila adalah cerminan dari ajaran tauhid dalam Islam. Tidak berhenti disini, Kiai As'ad dengan berani memaparkan pandangan dan kritikan langsung kepada Presiden Soeharto yang hendak menjadikan Pancasila sebagai alat menyamaratakan kebenaran semua agama.

## REFERENCE LIST

- Abdurrahman. (2019). *Kiprah K.H.R. As' ad Syamsul Arifin Dalam Mukhtamar Nahdlatul Ulama Ke-27 (1984) Di Situbondo*. 27(1984).
- Al-Mawardi, A. H. A. (2000). *الأحكام السلطانية* (P. 333).
- Aris, H., Abdul Halim, A., & Muslim, N. (2021). Keharmonian Kaum Berasaskan Sunnah: Kajian Terhadap Piagam Madinah. *Malaysian Journal Of Social Sciences And Humanities (Mjssh)*, 6(7), 139-148. <https://doi.org/10.47405/mjssh.v6i7.836>
- Astawa, P. A. (2017). Negara Dan Konstitusi. *Universitas Udayana*, 1-35.
- Aulia, A. (2019). Relasi Agama Dan Pancasila Menurut Pemikiran Kh Wahid Hasyim Dan Relevansinya. In *Skripsi Prodi Fakultas Syariah Dan Hukum Uin Syarif Hidayatullah*.
- Darmalaksana Wahyudin. (2020). Metode Penelitian Kualitatif Studi Pustaka Dan Studi Lapangan. *Pre-Print Digital Library Uin Sunan Gunung Djati Bandung*.
- Elviandri, E. (2019). Quo Vadis Negara Kesejahteraan: Meneguhkan Ideologi Welfare State Negara Hukum Kesejahteraan Indonesia. *Mimbar Hukum - Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada*, 31(2), 252. <https://doi.org/10.22146/jmh.32986>
- Fahrudin, M. M. (2013). Muatan Nilai Dan Prinsip Piagam Madinah Dan fPancasila: Analisa Perbandingan. *Ulul Albab Jurnal Studi Islam*. <https://doi.org/10.18860/ua.v0i0.2399>
- Jailani, I. A. (2016). Piagam Madinah: Landasan Filosofis Konstitusi Negara Demokratis. *Al-Daulah: Jurnal Hukum Dan Perundangan Islam*, 6(2).
- Jaya, M. A. C. (2012). *Implementasi Pancasila Pada Masa Orde Baru*. 14.

- Lukman, L. (2020). Piagam Madinah Sebagai Konsep Budaya Dan Peradaban. *Jurnal Bina Ummat: Membina Dan Membentengi Ummat*, 2(01), 27-46. <https://doi.org/10.38214/jurnalbinaummatstidnatsir.V2i01.47>
- Mursyid, S. (2016). Piagam Madinah Dan Uud Ri 1945 (Telah Perbandingan Tentang Kedudukannya Sebagai Konstitusi Negara Republik). *Jurnal Ilmiah Al-Syir'ah*, 1(1). <https://doi.org/10.30984/as.V1i1.182>
- Nurhadi. (2019). Ideologi Konstitusi Piagam Madinah Dan Relevansinya Dengan Ideologi Pancasila. *Volksgeist: Jurnal Ilmu Hukum Dan Konstitusi*, 2(1). <https://doi.org/10.24090/volksgeist.V2i1.1778>
- Rahmawati, R. (2018). Sistem Pemerintahan Islam Menurut Al-Mawardi Dan Aplikasinya Di Indonesia. *Diktum: Jurnal Syariah Dan Hukum*, 16(2), 264-283. <https://doi.org/10.35905/diktum.V16i2.621>
- Riri Reza Anshori. (2021). Pancasila Sebagai Dasar Negara Menurut K.H.Asy'ari. *Kewarganegaraan*, 16, 1-6.
- Sudarta. (2022). Peran Kh As'ad Syamsul Arifin Dalam Penerapan Asas Tunggal Pancasila Di Nahdlotul Ulama' Skripsi. *Skripsi Fakultas Adab Dan Humaniora Universitas Islam Negeri (Uin) Sunan Ampel Surabaya*, 16(1), 1-23.
- Tirakat Kh Hasyim Asy'ari Saat Mentashih Rumusan Pancasila.* (N.D.).
- Unggul, A. R. P., Ajati, D. T., Saputra, R. W., & Fitriono, R. A. (2022). Pancasila Sebagai Dasar Negara. *Jurnal Intelektiva*, 4(4), 25-31.